

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS-PEDOMAN
2019

PERMENKUMHAM NO.29, BN 2019/NO.1360, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan efektifitas pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun panduan bagi satuan kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERPRES No.54 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No.10 Tahun 2019; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Tahapan Pembangunan Zona Integritas, Syarat dan Mekanisme Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM, Penguatan/Pendampingan, Pembinaan, dan Pengawasan, dan Evaluasi dan Laporan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2019
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 38 hlm.